

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkomunikasi dengan publik merupakan komponen lainnya dalam praktek kehumasan suatu organisasi. Inilah yang kemudian memunculkan konsep humas (hubungan masyarakat) sebagai fungsi komunikasi, karena tugas utama dalam bidang humas adalah berkaitan dengan kegiatan komunikasi dengan publik. Adapun humas diharapkan bisa menjadi mata, telinga, dan tangan kanan pemimpin sebuah lembaga pemerintahan.

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi, kebijakan, program dan kegiatan- kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangat diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, memberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu bisa memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas (Maria, 2002:3).

Humas dalam pemerintahan menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah adalah agen dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaiknya. Maka suatu kewajiban apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Humas merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atau institusi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan humas berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada anggota dan masyarakat untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku agar disampaikan kepada pimpinan di dalam suatu institusi sebagai bahan pengambil keputusan. Sebagai juru bicara pimpinan merupakan tugas yang wajar dilakukan oleh pejabat humas karena pada dasarnya humas adalah juru bicara resmi setiap institusi. Humas yang profesional merencanakan apa dan bagaimana cara menyampaikan kebijakan pimpinan kepada publik.

Perbedaan mendasar dari humas perusahaan dengan humas pemerintah adalah apa yang di komunikasikan. Apabila humas perusahaan mengomunikasikan citra atau produk perusahaan tersebut, maka humas pemerintahan mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Praktisi *Public Relations* (hubungan masyarakat) bertindak sebagai konselor bagi manajemen dan sebagai mediator, membantu menerjemahkan tujuan privat ke dalam kebijakan dan tindakan yang masuk akal dan bisa diterima oleh publik (Cutlip, 2009:7). Adapun persamaan humas pemerintah dan humas perusahaan sama-sama membangun reputasi dan menjaga citra positif.

Reputasi merupakan suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan *sustainable* apabila konsistennya perkataan dan perbuatan (Basya, dalam Basya dan Sati. 2006:6).

Reputasi adalah tujuan sekaligus merupakan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia *Public Relations*. Bagi perusahaan, reputasi adalah titipan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, jika perusahaan mengalami krisis kepercayaan dari publik, maka akan membawa dampak negatif terhadap reputasi dan akan memerlukan usaha keras untuk menumbuhkan dan membangun kembali kepercayaan. Reputasi merupakan suatu hal yang harus di bangun dalam waktu yang lama. Dari pembentukan identitas, sampai pada prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah di dapatkan. Bukan hanya berhenti pada prestasi, prasarana non fisik juga mendukung pemerintah dalam membangun reputasi. Mulai dari sejarah perjalanan hidup atau sepak terjang sebuah instansi dalam masyarakat juga ikut menentukan, apakah keberadaan instansi dapat simpati dan dihormati atau sebaliknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:667), citra adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Citra dalam suatu instansi tidak muncul dengan sendirinya. Akan tetapi citra harus diupayakan dengan berbagai cara agar selalu terpelihara. Pada kenyataan dalam pergaulan atau proses hubungan kerjasama terjadi kejadian yang menimbulkan citra positif dan negatif.

Pentingnya peran humas dalam membangun reputasi dan citra pada pemerintah, melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Mengenai peranan humas dalam membangun reputasi dan citra sebuah pemerintahan. Peneliti ingin mendapatkan gambaran bagaimana peran humas dalam mengimplementasikan reputasi dan citra. Peneliti memilih Bagian Humas Setda Kab (Sekretariat Daerah) Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai subjek penelitian, disebabkan berita yang muncul dari pemerintahan baru. Peneliti

tertarik untuk mengikuti berita tersebut, yaitu mengenai pemerintahan periode 2016-2021, yang dipimpin oleh Yusuf Lubis selaku Bupati Pasaman dan Atos Pratama selaku Wakil Bupati.

Berdasarkan observasi awal peneliti, Kabupaten Pasaman sedang mengalami masalah dengan sistem pemerintahan yang baru. Dapat di lihat dari <http://sumbar.auditpos.com/2016/10/12/dendam-politik-bupati-mutasi-bakal-digugat/> mengatakan masih adanya masalah pilkada yang berdampak pada pemerintahan Bupati Yusuf Lubis dan Atos melawan pemerintahan Kubu Benny Utama dan Danil. Berdasarkan berita yang dikutip dari sumber media menerangkan bahwa:

“Mutasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman, terlihat sebagai ajang tindakan tidak masuk akal sang penguasa, terhadap para pegawai yang dianggap tidak mendukung ketika Pilkada. Masalah ini masih belum usai walaupun pemerintahan Yusuf Lubis dan Atos sudah memasuki tahun kedua. Masalah ini timbul dikarenakan kemenangan pilkada Bupati Yusuf melawan Benny. Ini berdampak pada mutasi yang dilakukan Yusuf Lubis kepada para pendukung Benny Utama dan diganti dengan pendukungnya”.

Dapat dilihat pada News.sumut.com/mahasiswa-pasaman-mendorong-kementerian-dalam-negeri-bersikap-tegas-dalam-kasus-mutasi, Komite Mahasiswa Pasaman (Kompas) Sumatera Utara, mendorong Kementerian Dalam Negeri agar bersikap tegas dalam menyikapi kasus mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Bupati Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dinilai sarat pelanggaran. Berdasarkan berita yang di kutip dari sumber media menerangkan bahwa:

“Jika terjadi mutasi atau pengangkatan jabatan harus melalui mekanisme atau prosedural melalui tim Baperjakat (Badan pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Tidak boleh mutasi pegawai

dengan non-job, sebab mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong atau kosong. Bupati memiliki hak prerogatif (hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan dan badan-badan perwakilan) untuk melakukan mutasi. Namun, dalam mutasi juga ada aturan dan proses yang harus dilalui”.

Pemerintah Kabupaten Pasaman ternyata melakukan mutasi khususnya jabatan eselon III dan IV. Namun, berbeda dengan pejabat sebelumnya, Kepala Bagian Humas Pasaman mundur dengan sendirinya sebelum dilakukan mutasi secara keseluruhan. Berita ini menjadi semakin menarik minat peneliti untuk mendalami lebih lanjut permasalahan yang sedang terjadi. Berdasarkan berita yang di kutip dari <http://ovumnews.com/dibalik-mudurnya-kabag-humas-pemkab-pasaman/> menerangkan bahwa:

“Kepala Bagian Humas, Budi Hermawan telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Kabag Humas Pemkab Pasaman, tertanggal 15 April 2016 lalu, karena tidak sanggup menghadapi tekanan serta berimplikasi dirinya akan dijadikan korban dari benturan oknum-oknum tertentu, dengan banyaknya muncul wartawan yang belum diketahui datangnya dari mana”.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik ingin melihat lebih jauh bagaimana cara humas yang baru dalam membentuk reputasi dan citra pemerintah. Di tengah berbagai masalah internal dalam pemerintahan. Tentunya permasalahan ini menjadi PR sendiri oleh Humas Pemerintah Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu peneliti memilih “Membangun reputasi dan citra Pemerintah Baru (Studi tentang peran bagian humas dalam kasus mutasi pegawai di Kabupaten Pasaman)” sebagai permasalahan yang menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Bagian Humas Setda Kab Pasaman dalam membangun reputasi dan citra dalam kasus mutasi pegawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar hasil yang di peroleh lebih terarah serta mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas, maka seperti yang telah dijabarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peran bagian humas dalam membangun reputasi dan citra pemerintah kabupaten Pasaman.
2. Menjelaskan bentuk dukungan Kepala Daerah terhadap pekerjaan humas.
3. Menjelaskan hubungan humas dengan pihak media.
4. Menjelaskan hubungan humas dengan pihak humas sendiri (internal).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan masukan atau bahan pertimbangan bagi semua pihak akan perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang praktisi humas dan dalam mencapai praktek humas yang baik. Serta dapat menjadi solusi yang tepat bagi humas dalam menangani masalah krisis terutama krisis komunikasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dalam membangun reputasi dan citra pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Bagian Humas Setda Kab Pasaman dalam membangun reputasi dan citra.

